



FAIRID NAPARIN
WALI KOTA PALANGKA RAYA



ACHMAD ZAINI
WAKIL WALI KOTA PALANGKA RAYA

**RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(RLPPD)
KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan disampaikan tepat waktu.

Hasil dari Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini diharapkan mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, berfokus kepada *result*, yaitu sejauh mana kinerja organisasi memberi manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi dan menyajikan alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di masa datang.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024 ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Palangka Raya pada masa yang akan datang dan membawa Kota Palangka Raya dengan berlandaskan prinsip Isen Mulang sebagai Kota yang Maju, Rukun, dan Sejahtera untuk semua.

Palangka Raya, Maret 2025



1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kota Palangka Raya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	81,95	82,53	0,71
2	Angka Kemiskinan	3,44	3,52	2,33
3	Angka Pengangguran	5,13	5,02	-2,14
4	Pertumbuhan Ekonomi	6,57	6,62	0,76
5	Pendapatan per Kapita	79,06	84,6	7,01
6	Ketimpangan Pendapatan	0,31	0,309	-0,32

Sumber data : BPS Kota Palangka Raya, 2025

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kota Palangka Raya pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	96,78	98,39
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang	97,37	98,31

	berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96,85	96,92
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	96,45	99,48

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya (2025)

https://elppd.kemendagri.go.id/trx_ikk

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Anggaran belanja urusan Pendidikan di Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebesar Rp. 409.325.259.260 yang direalisasikan melalui Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya sebesar Rp. 389.512.601.657 (95,16%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Pendidikan

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

b. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kota Palangka Raya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Proses pengerjaan paket fisik baru mulai dilaksanakan paling cepat bulan Maret
- b. Penggunaan Dana BOS masih belum sepenuhnya sesuai dengan juknis tata kelola BOS.

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Palangka Raya pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	3,35	4,02
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95,35	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	92,18	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	94,27	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	93,92	66
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,32	66
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	87,68
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,25	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,68	98,09
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	94,90	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	91,00	100

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya (2025)

https://elppd.kemendagri.go.id/trx_ikk

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Anggaran urusan Kesehatan di Kota Palangka Raya sebesar pada tahun 2023 Rp. 234.061.784.296 dan direalisasikan melalui Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya sebesar Rp. 211.960.373.966 (90,56%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Pengembangan Puskesmas
 - Pengembanagan Fasilitas Kesehatan lainnya
 - Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Realisasi sarapan berdasarkan kesepakatan cetak pesanan pada ekatalog dengan Pagu DAK Fisik TA 2024 sebesar Rp. 1.129.864.554 atau 75,3% dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Nilai kontrak merupakan hasil negosiasi antara pemesan dan penyedia
- b) Terdapat perbedaan harga unit alat Kesehatan pada perencanaan 2023 dengan ketersediaan alat Kesehatan pada ekatalog 2024
- c) Mewajibkan pembelian alat Kesehatan harus memenuhi syarat memiliki TKDN
- d) Ongkos kirim bersifat real cost ekspedisi (invoice) pada RK ongkos kirim menggunakan referensi ongkos kirim yang ada pada ekatalog

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperoleh oleh Kota Palangka Raya pada Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0 (Bukan Kewenangan Kota)	0 (Bukan Kewenangan Kota)
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0 (Bukan Kewenangan Kota)	0 (Bukan Kewenangan Kota)

3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	36,76	39,04
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	84,98	87,81
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,12	80,53
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	64,35	65,78
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	84,96	81,02
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya (2025)
https://elppd.kemendagri.go.id/trx_ikk

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Anggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Palangka Raya sebesar pada tahun 2024 Rp. 163.759.167.338 dan direalisasikan melalui Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sebesar Rp. 157.733.536.108 (96,32%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Penataan Bangunan Gedung
 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- g. Program Penyelenggaraan Jalan
 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Palangka Raya Tahun 2024 adalah

- a. Terdapat paket pekerjaan yang gagal tender yaitu pengadaan Pompa Intake Kapasitas 140 L/det 1 unit akibat pihak penyedia tidak mampu memenuhi syarat dan ketentuan (spesifikasi) yang telah ditentukan dengan alasan alat tersebut berupa barang impor.
- b. Terdapat Paket pekerjaan yang gagal tender yaitu pengadaan Pompa Intake L/det 1 unit, akibat pihak penyedia tidak mampu memenuhi syarat dan ketentuan (spesifikasi) yang telah ditentukan dengan alasan alat tersebut berupa barang import.
- c. Terdapat 1 Paket Pekerjaan yang Terjadi Gagal Tender dikarenakan kelengkapan berkas yang tidak dapat terpenuhi dan bila dilakukan tender ulang waktu pelaksanaannya tidak akan mencukupi.
- d. Untuk Kegiatan Sosialisasi Perda/Perkada terkendala karena waktu pelaksanaan yang mepet mengingat penetapan perubahan APBD 2024 diawal November 2024.

- e. Proses penyusunan peninjauan Kembali dan penyusunan Revisi RTRW Kota Palangka Raya belum terlaksana karena RTRW Provinsi Kalimantan Tengah belum ditetapkan.
- f. Untuk kegiatan SIMTARU terdapat kesalahan kode rekening belanja sehingga tidak dilaksanakan.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diperoleh oleh Kota Palangka Raya pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	60
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	100	13,75
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,90	5,87
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	100

Sumber data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya (2025)

https://elppd.kemendagri.go.id/trx_ikk

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Anggaran urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebesar Rp. 109.602.426.970 dengan realisasi belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebesar Rp. 108.160.240.741 (98,68%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Perumahan
 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
- Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
- c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Palangka Raya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Masih perlu ditingkatkan lagi upaya dalam pengentasan rumah tidak layak huni di Kota Palangka Raya
- b. Peningkatan kualitas penerangan jalan umum pada permukiman

5. Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kota Palangka Raya Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	98,23	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100

6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	91,30	95,69
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	6,12	7,06

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya (2025), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya (2025), Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palangka Raya (2025), https://elppd.kemendagri.go.id/trx_ikk

B. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Anggaran belanja urusan Ketentraman Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebesar Rp. 18.502.879.284 dan direalisasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sebesar Rp. 18.245.759.261 (98,61%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :
 - a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- 2) Anggaran belanja urusan Ketentraman Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebesar Rp. 10.645.474.707 dan direalisasikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebesar Rp. 10.352.261.106 (97,25%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :
 - a. INOVASI PERISAI (Pemetaan Risiko Berbasis Sistem Analisa Dini) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Dokumen RENKON Banjiri
 - Pengadaan Sarpras PUSDALOPS
- 3) Anggaran belanja urusan Ketentraman Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebesar Rp 11.703.501.510 dan direalisasikan pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palangka Raya sebesar Rp. 11.282.447.952 (96,40%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :
 - a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - Investigasi Kejadian Kebakaran
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Palangka Raya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan yang terjadi adalah masih adanya ditemukan Pelanggaran Perda dan Perwali di Kota Palangka Raya.
- b. Belum tersedianya anggaran dalam pengembangan inovasi.
- c. Alokasi dan beban anggaran untuk sarana dan prasarana kurang memperhatikan atau tidak sebanding dengan efek kinerja yang ditimbulkan (anggaran biaya operasional terbatas).
- d. Kurangnya anggaran untuk penyusunan Dokumen RENKON Banjiri.
- e. Belum tersedia anggaran untuk Sarpras PUSDALOPS.
- f. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya belum memadai hanya terdapat 1 Mako dan 1 Pos Sektor, tidak sebanding dengan luas WMK yang harus dilayani.
- g. Alokasi dan beban anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya belum sepenuhnya mampu untuk mengakomodir biaya operasional penanganan kegiatan, dan peningkatan kapasitas Aparatur (diklat keahlian).

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kota Palangka Raya pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	99,55	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Anggaran belanja urusan Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebesar Rp 15.991.024.722 dan direalisasikan pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebesar Rp. 15.583.113.362 (97,45%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Sosial
 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Rehabilitasi Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Penanganan Bencana
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kota Palangka Raya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Penjangkauan yang masih kurang kepada PPKS di daerah tertentu yang sulit diakses.
- b. PPKS tidak mendapatkan hak dan kebutuhan dasarnya.
- c. Masih minimnya pengelolaan data
- d. Sarana dan Prasarana kebencanaan yang minim

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2,89 dan status kinerja Sedang.
- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 berhasil

mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,1158 dan status kinerja Sedang.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 25.A/LHP/XIX.PAL/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 Kota Palangka Raya berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang berarti Kota Palangka Raya telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Audited/Unaudited) Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 1.417.850.526.906,33 (96,85%) dan Realisasi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 mencapai Rp. 1.456.074.109.672,67 (93,94%).

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.464.011.748.708,00	1.417.850.526.906,33	96,85	1.259.296.045.300,85
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	233.763.792.010,00	199.588.179.699,33	85,38	188.380.645.282,85
4.1.01	Pajak Daerah	164.415.266.411,00	162.307.983.283,74	98,72	150.594.656.898,00
4.1.02	Retribusi Daerah	20.839.724.550,00	18.278.093.635,00	87,71	13.933.973.543,02
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.049.777.516,00	2.597.478.582,50	126,72	81.147.428,96
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	46.459.023.533,00	16.404.624.198,09	35,31	23.770.867.412,87
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	233.763.792.010,00	199.588.179.699,33	85,38	188.380.645.282,85
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.218.863.288.858,00	1.205.220.225.806,00	98,88	1.059.402.458.308,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.106.841.237.416,00	1.093.150.172.103,00	98,76	913.688.943.377,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	112.022.051.442,00	112.070.053.703,00	100,04	145.713.514.931,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.384.667.840,00	13.042.121.401,00	114,56	11.512.941.710,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	375.000.000,00	2.719.227.295,00	725,13	1.752.906.664,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.009.667.840,00	10.322.894.106,00	93,76	9.760.035.046,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.384.667.840,00	13.042.121.401,00	114,56	11.512.941.710,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.464.011.748.708,00	1.417.850.526.906,33	96,85	1.259.296.045.300,85
5	BELANJA DAERAH	1.549.940.752.475,00	1.456.074.109.672,67	93,94	1.326.550.654.745,85
5.1	BELANJA OPERASI	1.205.150.396.761,00	1.125.837.640.898,22	93,42	1.044.031.428.999,85
5.1.01	Belanja Pegawai	609.021.000.651,00	584.810.452.166,00	96,02	520.443.307.879,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.915.095.415,00	475.404.126.994,33	90,91	475.137.420.309,85
5.1.03	Belanja Bunga	2.915.029.008,00	2.529.454.558,89	86,77	5.649.396.698,00
5.1.05	Belanja Hibah	68.566.771.687,00	61.498.073.179,00	89,69	41.261.099.863,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.732.500.000,00	1.595.534.000,00	92,09	1.540.204.250,00

	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.205.150.396.761,00	1.125.837.640.898,22	93,42	1.044.031.428.999,85
5.2	BELANJA MODAL	341.769.840.717,00	327.997.382.474,45	95,97	281.343.767.566,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.738.505.000,00	2.620.818.000,00	95,70	4.003.383.082,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.662.824.505,00	48.825.356.209,00	86,17	84.884.254.418,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.551.650.370,00	121.569.959.253,32	97,61	111.616.449.607,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	157.411.660.842,00	154.589.854.012,13	98,21	78.792.977.882,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	255.200.000,00	252.895.000,00	99,10	1.992.109.257,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	138.500.000,00	92,33	54.593.320,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	341.769.840.717,00	327.997.382.474,45	95,97	281.343.767.566,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.773.825.241,00	1.994.086.300,00	71,89	930.458.180,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.773.825.241,00	1.994.086.300,00	71,89	930.458.180,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	2.773.825.241,00	1.994.086.300,00	71,89	930.458.180,00
5.4	BELANJA TRANSFER	246.689.756,00	245.000.000,00	99,32	245.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	246.689.756,00	245.000.000,00	99,32	245.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	246.689.756,00	245.000.000,00	99,32	245.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.549.940.752.475,00	1.456.074.109.672,67	93,94	1.326.550.654.745,85
	SURPLUS/DEFISIT	(85.929.003.767,00)	(38.223.582.766,34)	44,48	(67.254.609.445,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	85.929.003.767,00	91.200.976.657,14	106,14	225.040.324.552,80
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	157.785.715.108,00	157.785.715.107,80	100,00	291.625.078.331,80
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	157.785.715.108,00	157.785.715.107,80	100,00	291.625.078.331,80
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	157.785.715.108,00	157.785.715.107,80	100,00	291.625.078.331,80
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	71.856.711.341,00	66.584.738.450,66	92,66	66.584.753.779,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.777.500.000,00	10.507.500.000,00	66,60	10.507.500.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	56.079.211.341,00	56.077.238.450,66	100,00	56.077.253.779,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	71.856.711.341,00	66.584.738.450,66	92,66	66.584.753.779,00
	PEMBIAYAAN NETTO	85.929.003.767,00	91.200.976.657,14	106,14	225.040.324.552,80
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	52.977.393.890,80	0,00	157.785.715.107,80

(Sumber : BPKAD Kota Palangka Raya sebelum audit BPK RI, data per 26 Maret 2025)

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-4898 Tahun 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024, Pemerintah Kota Palangka Raya mendapat Skor 50,21 dengan Predikat Inovatif.

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	ASESSMENT DAN WAWANCARA MUTASI PNS (AWASI PNS)	Mekanisme atau cara baru yang pada Bidang Mutasi BKPSDM Kota Palangka Raya yaitu pertama bekerjasama dengan Subbid Data Pegawai guna memperoleh informasi Pemetaan PNS teraktual berdasarkan Data SIMPEG yang akan menampilkan data Jumlah JFT dan JFU pada SOPD beserta Jabatannya, kedua adalah

			Layanan Assesment dan Wawancara bagi PNS yang mengusulkan pindah atas permintaan sendiri. Layanan ini dilaksanakan dengan melibatkan tenaga Psikologi yang ada di BKPSDM Kota Palangka Raya.
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	APLIKASI BEZETTING PEGAWAI	Inovasi untuk mendukung penyebaran dan pemerataan penempatan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan adanya kontrol dari pimpinan instansi, ASN akan bekerja lebih bertanggungjawab terhadap pekerjaannya dikarenakan beban kerja yang jelas sehingga target SKP bisa tercapai, yang nantinya juga akan menambah penghasilan dari Tunjangan Penghasilan.
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	JEBOL IP ASN	Untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN dimana ada 4 dimensi yaitu disiplin, kinerja, kompetensi dan kualifikasi. Tujuan akhir penetapan IP ASN untuk mengetahui standar profesionalitas, melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

4	Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya	STRATEGI DENI (DETEKSI DINI) MEWUJUDKAN KOTA PALANGKA RAYA AMAN DAN SEJAHTERA	Melaksanakan strategi Deteksi Dini guna Mewujudkan Kota Palangka Raya Aman Dan Sejahtera akan dilakukan beberapa inovasi antara lain : a. Membentuk Pusat Komunikasi dan Informasi terkait deteksi dini dengan Tagline: Si Deni (Strategi Deteksi Dini). b. Membentuk jejaring Deteksi Dini sebagai sarana Informasi dari tingkat Kecamatan dan Kelurahan. c. Membuat Standar Operasional Prosedur yang menjadi pedoman untuk mengkoordinasikan, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi demi terlaksananya Si Deni (Strategi Deteksi Dini).
---	-------------------------------------	---	---

(Sumber : Bapperida Kota Palangka Raya, 2025)

PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya yang telah dicapai selama ini merupakan hasil kerjasama dari semua pihak (*stakeholders*) dan diharapkan dapat terus berjalan dengan lebih sempurna sesuai kewenangan, tugas dan kompetensi masing-masing, sehingga seluruh program pembangunan yang telah disepakati dan menjadi tujuan bersama dapat terwujud.

Tantangan terbesar Kota Palangka Raya adalah menyiapkan Kota Palangka Raya agar dapat memperoleh manfaat dari proses globalisasi serta dapat berkembang secara berkelanjutan untuk mewujudkan Visi Kota Palangka Raya **“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**.

Pemerintah Kota Palangka Raya telah mencoba memenuhi komitmen moral, bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Palangka Raya di masa mendatang, yang dihadapkan pada percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024 ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dengan harapan semoga senantiasa dapat dijadikan bahan informasi, maupun referensi sekaligus bahan evaluasi dan motivasi dalam penyempurnaan kinerja Pemerintahan Daerah pada tahun mendatang.

Palangka Raya, Maret 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA



FAIRID NAPARIN